

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Dan Pengembangan Hipotesis

1. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi dan tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu (Donaldson & Davis, 1991).

Asumsi yang berkaitan dengan teori *stewardship* diciptakan berlandaskan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, dapat bertindak dengan tanggungjawab, mempunyai integritas, dan berlaku jujur terhadap pihak yang lainnya, *stewardship theory* berpendapat bahwa manajemen lebih mementingkan kepentingan publik secara umum atau *shareholders* pada khususnya dan dapat berperilaku baik (Murwaningsari, 2009).

Teori ini mencerminkan keterkaitan yang kuat yaitu kepuasan dan kesuksesan tujuan organisasi. Capaian kesuksesan organisasi dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan *utilitas principals* dan manajemen. Teori dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang non profit lainnya (Imran, 2015).

Mewujudkan tujuan *good governance* dapat menggunakan LKPD sebagai suatu solusi pemerintahan. Pemerintah daerah harus

memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitannya dengan akuntansi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya.

Akuntansi organisasi sektor publik pada awalnya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Selaku *principals* tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi sangat dibutuhkan.

Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Sektor Publik adalah suatu penggambaran posisi keuangan yang berasal dari kegiatan transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas bagian publik (Sholohah, 2018). Penggunaan informasi keuangan sektor publik dengan tujuan untuk membuat pemerintah yang memiliki tanggung jawab, untuk membantu dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan alokasi sumber daya yang efisien (Krambia *et al.*, 2016). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan, fungsinya yaitu untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasi, melaporkan keadaan keuangan dan sumber daya yang dimiliki jangka panjang (Jones, 2010).

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Kualitas Laporan Keuangan dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Relevan

Suatu laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan yang relevan jika informasi dapat memberi pengaruh terhadap penggunaannya dengan membantu meninjau kembali atau mengevaluasi peristiwa masa kini ataupun peristiwa masa lalu, memprediksi kejadian masa depan, dan dapat memberikan koreksi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu. Informasi yang dikatakan relevan memiliki karakteristik, manfaat bagi penggunaannya sesuai dengan waktunya, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.

2. Andal

Dapat dikatakan andal apabila informasi yang ada di suatu laporan keuangan terhindar dari suatu kesalahan secara material, dan mesmberikan informasi sesuai dengan keadaan aslinya dengan terhindar dari manipulasi, bisa diverifikasi, serta

terhindar dari memihak hanya kepada pihak tertentu yang membutuhkan.

3. Dapat Dibandingkan

Dapat dikatakan dapat dibandingkan apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan di suatu periode yang telah berlalu.

4. Dapat Dipahami

Suatu informasi yang dihasilkan suatu pelaporan keuangan mudah untuk dimengerti oleh penggunanya dengan dituliskan serta dipaparkan menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang telah diadaptasi dengan batas-batas pengetahuan penggunanya, dengan ini pengguna laporan keuangan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu kecakapan yang dimiliki seseorang yang berupa jenjang atau tingkat pendidikan yang dicapai, *training* yang pernah diikuti dan banyaknya pengalaman untuk menyelesaikan masalah maupun tugas serta tanggungjawab yang diemban oleh seseorang tersebut. Dalam pengelolaan dan penyajian informasi peran Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat penting dan sangat

berpengaruh, sehingga Laporan Keuangan yang disusun dapat disajikan sesuai waktu yang ditentukan (Pujanira & Taman, 2017).

McClelland (2012) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki seseorang sebagai ciri mendasar yang berpengaruh langsung, ataupun dapat meramalkan kinerja yang sangat baik. Kemampuan dan ciri yang dimiliki seseorang khususnya pegawai yang berbentuk ilmu pengetahuan, keterampilan, moral dan perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban tugas dan kegiatan jabatannya, agar pegawai tersebut dapat menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang di berikan secara professional, efektif dan efisien (McClelland, 2012). Kelangsungan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta pembangunan negara sangat berkaitan dengan kemampuan dan kesempurnaan aparatur negaranya.

Kreatifitas dan kemampuan personal seorang aparatur negara berdasarkan pada tingkat dan kualitas pendidikan dan pembinaan tenaga kerja serta pengalaman yang telah dimiliki di lingkup bidang pengetahuan yang didapatkan maupun diberikan seiring dengan berjalanya waktu, pada saat ini tingkat pendidikan yang tinggi serta pengalaman yang cukup sangat berpengaruh untuk hasil dan kualitas suatu pemerintahan

(Octariani *et al.*, 2017). Berlandaskan beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas serta tanggungjawab yang diemban dalam organisasi dengan dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai agar tercapainya tujuan organisasi dengan baik.

b. Indikator Sumber Daya Manusia

Delanno (2013) menyatakan bahwa tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur menggunakan:

a. Pendidikan

Pembelajaran atau pendidikan yaitu salah satu kegiatan di kehidupan manusia dan merupakan pengolahan yang tersistematis yang akan merubah perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang dirumuskan oleh organisasi.

Pendidikan dibagi menjadi:

1. Edukasi resmi
2. Edukasi nonformal
3. Edukasi informal

b. Pelatihan (*training*)

Training wajib berkaitan sesuai ketangkasan yang dimiliki agar dapat menjalankan aktivitasnya.

c. Pengalaman

Manusia yang sudah pernah melakukan banyak hal maka manusia tersebut secara perlahan pastinya mampu menjalankan suatu aktivitas pekerjaan, kegiatan, mempunyai pengetahuan yang luas, dan mudah untuk beradaptasi dengan keadaan disekitarnya (Yosefriandi, 2013).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dan dipengaruhi oleh manajemen yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang cukup dalam pencapaian yang efektif dan efisien. Kepatuhan sesuai dengan aturan perundangan yang ada, dan keunggulan pengungkapan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Pentingnya menerapkan sistem pengendalian internal karena sering kali pemerintahan sektor publik dituduh tidak fleksibel dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan dituduh banyak birokrasi oleh karena itu sistem pengendalian internal tidak dapat ditinggalkan (Alam *et al.*, 2019).

Pengendalian Internal merupakan suatu pengolahan yang menyeluruh terhadap aktivitas serta usaha yang dijalankan dengan berkelanjutan seterusnya dari pusat-pusat pertanggungjawaban dan semua karyawan agar membentuk keyakinan dan motivasi memadai dengan berhasilnya tujuan dan visi organisasi untuk dicapai dengan menjalankan aktivitas yang baik dan positif, pelaporan keuangan dapat

diandalkan, perlindungan aset negara, dan kedisiplinan terhadap perundangan yang di berlakukan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008). Berlandaskan dari pengertian yang disebutkan dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan dan pengendalian di internal Pemerintah yaitu suatu proses yang dirumuskan dan diciptakan oleh pengelola agar memberi jaminan yang cukup dari terwujudnya visi serta tujuan organisasi lewat aktivitas pekerjaan yang baik, keterpercayaan terhadap pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kedisiplinan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah cakupan penilaian yang akan digunakan dalam pengukuran nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 , yaitu:

1. Lingkungan

Lingkungan yaitu suatu langkah sebagai cerminan perilaku pusat pertanggungjawaban ataupun organisasi perangkat terkait pengelolaan internal yang dapat menciptakan keyakinan semua karyawan terkait sangat penting pengelolaan atau pengendalian terhadap lembaga yang terkait di setiap bidang atau dinasny. Seluruh anggota baik pimpinan atau pegawai Instansi Pemerintah wajib untuk membentuk dan menjaga keadaan di dalam setiap sudut yang ada di organisasi

tersebut yang akan mendorong terbentuknya sikap yang baik dan keprilakuan yang mendukung atas pengendalian internal dan pengelolaan yang baik dan sesuai peraturan dengan tujuan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran Risiko adalah suatu analisis serta identifikasi entitas yang relevan agar tercapainya visi dan tujuannya, dan akan menciptakan suatu landasan untuk menentukan seperti apa risiko harus dikendalikan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian akan mendorong pengelolaan serta meyakinkan bahwa arahan pusat pertanggungjawaban atau pimpinan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan, dalam aktivitas pengendalian ini harus dapat dikelola secara efektif, baik dan efisien terkait mencapai visi lembaga atau bidang organisasi.

4. Komunikasi dan Informasi

Suatu informasi wajib dituliskan dan disampaikan pada pusat pertanggungjawaban yang terkait dan juga pihak-pihak yang membutuhkan dan telah terpilih, informasi disajikan menggunakan gaya dan wadah yang telah ditentukan serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga akan mempermudah pimpinan dalam menjalankan dan melaksanakan pengelolaan serta kewajibanya.

5. *Controlling*

Controlling dilakukan untuk menilai kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan dan memastikan bahwa rekomendasi dan saran hasil audit dan *review* yang lainnya dapat ditindak lanjuti secara cepat (PP Nomor 60 tahun 2008).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan sebuah bentuk yang umum yang mencerminkan dan memberi gambaran setiap bentuk teknologi yang mempermudah untuk menghasilkan sesuatu, memanipulasi, menyimpan atau membicarakan dan menyampaikan suatu informasi (Yuniatin *et al.*, 2017). Teknologi informasi berguna dalam proses meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan pengumpulan, komputasi, penyimpanan dan komunikasi, dapat memberdayakan eksekutif dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang berkualitas (Abraham, 2012).

Cloud computing merupakan bentuk baru dari sistem komputasi yang dasarnya dari internet dan masih dikembangkan ke berbagai bentuk salah satunya adalah layanan yang dipaparkan menggunakan cara yang hampir sama dengan utilitas tradisional (Jafari *et al.*, 2017). Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan dengan informasi dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi (Azlan *et al.*, 2011). Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sikap

akuntan dan perikalu untuk menggunakan suatu teknologi informasi guna untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas serta meningkatkan kinerja (Wahyuni *et al.*, 2018). Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi menurut Suyanto (2005) indikatornya dapat diukur menggunakan komponen sebagai berikut:

1. *Hardware*

Merupakan perangkat yang ada di dalam sistem informasi yaitu disebut perangkat keras yang terbagi menjadi dari *Input* dan *Output*. Sebagai kesatuan alat yang memiliki fungsi untuk menyimpan data, gambar dan lain-lain, dan juga sebagai alat untuk mempersiapkan suatu data serta terminal *input* dan *output*.

2. *Software*

Perangkat yang digunakan untuk menyokong penyebaran data informasi seperti sistem pengelolaan.

3. Komunikasi dan Jaringan

Komunikasi dan Jaringan yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan dan menyambungkan suatu titik-titik komunikasi yang akan menjadi satu kesatuan yang dapat saling merespon di antara setiap titik yang satu dengan titik yang lainnya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah dan memelihara kualitas silaturahmi menggunakan jaringan internet, saat ini peningkatan

kemampuan jaringan untuk dapat saling terhubung berjalan dengan pesat. Sukirman, Sularso dan Nugraheni (2012) berpendapat bahwa indikator Penggunaan TI yaitu sebagai berikut ini:

1. Mempunyai komputer.
2. Mempunyai serta dapat mengoperasikan internet.
3. Memanfaatkan komputer untuk kegiatan akuntansi.
4. Memanfaatkan *software* yang sesuai dan tidak menentang peraturan undang-undang yang berlaku.
5. Adanya laporan yang terintegrasi yang berkaitan dengan akuntansi dan manajerial.
6. Adanya perawatan alat-alat yang digunakan.
7. Adanya proses *service* atau perbaikan alat yang telah rusak ataupun sudah tidak normal.

Berlandaskan pengertian tersebut, yang akan menjadi dasar penilaian indikator penggunaan TI dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Pemanfaatan Alat Komputer.
- (2) Pemanfaatan Jaringan Internet.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Stewardship theory menyatakan bahwa kepentingan organisasi itu lebih dipentingkan dan fokus pada sasaran tujuan organisasi dan tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu. Dalam penelitian ini Sumber Daya Yang dimiliki digunakan untuk kepentingan tujuan organisasi yaitu untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhubungan langsung dengan sistem akan dipaksakan agar dapat menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi yang baik dan memadai setidaknya memiliki motivasi dan rasa ingin tahu serta kemauan untuk tidak berhenti menggali dan memahami dan belajar serta menambah keahlian khususnya dibidang akuntansi, jika SDM yang menjalankan sistem akuntansi kurang memiliki keahlian dibidangnya, maka kemungkinan terbesar akan menimbulkan kekeliruan atau hambatan di dalam kegiatan serta pelaksanaan yang mencakup fungsi akuntansi.

penelitian yang pernah dilakukan oleh Pujanira and Taman (2017), Eveline (2017), Rahmawati (2015) menghasilkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Eveline (2016), hasilnya menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kegagalan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menerapkan akal sehat akuntansi akan menimbulkan dampak yang *negative* seperti terjadinya kekeliruan dalam penyusunan maupun hasil dari Laporan Keuangan yang dibuat, akan terjadi ketidaksesuaian laporan dengan perundangan dan standar yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kualitasnya menjadi rendah. Dengan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM, akan semakin meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Stewardship theory menyatakan bahwa tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu, sehingga pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah lebih ke tujuan organisasi yaitu untuk memperbaiki dan menghasilkan Laporan Keuangan yang kualitasnya semakin baik bukan untuk tujuan individu. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan alur yang dibuat dan dirancang oleh manajemen agar dapat memberikan jaminan atau keyakinan yang sesuai atas tercapainya tujuan dari organisasi dengan

perantara kegiatan yang berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan Pemerintah atau perundang-undangan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rusvianto *et al.* (2018), Surjono (2018), Fatmawati and Setiawan (2018) hasilnya menunjukkan adanya pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati (2013), hasilnya menemukan bahwa sistem pengendalian internal di area pemerintah daerah tidak efektif untuk menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pemimpin/*Leader* dapat memberikan pengarahan terhadap bawahannya serta dapat melindungi aset yang dimiliki organisasi dari kegiatan yang negatif seperti penggelapan atau *fraud*.

Apabila sistem dalam pengendalian internal suatu organisasi itu rendah, maka kemungkinan akan terjadinya suatu kesalahan, tingkat akurasi menurun atau manipulasi yang akan menguntungkan salah satu pihak dalam proses penyajian Laporan Keuangan Organisasi kemungkinannya akan sangat besar, jika di dalam suatu pemerintahan terdapat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang tinggi, maka akan dapat menyempitkan kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan atau *fraud* dalam penyajian Laporan Keuangan, dengan ini akan menunjukkan bahwa apabila Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah semakin tinggi, maka akan diikuti dengan semakin tingginya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Stewardship theory menyatakan bahwa tidak ada keinginan dan motivasi untuk mementingkan tujuan individu namun lebih fokus terhadap tujuan organisasi. Dalam penelitian ini Pemanfaatan Teknologi Informasi di manfaatkan dan dimaksimalkan untuk tujuan organisasi bukan untuk tujuan individu.

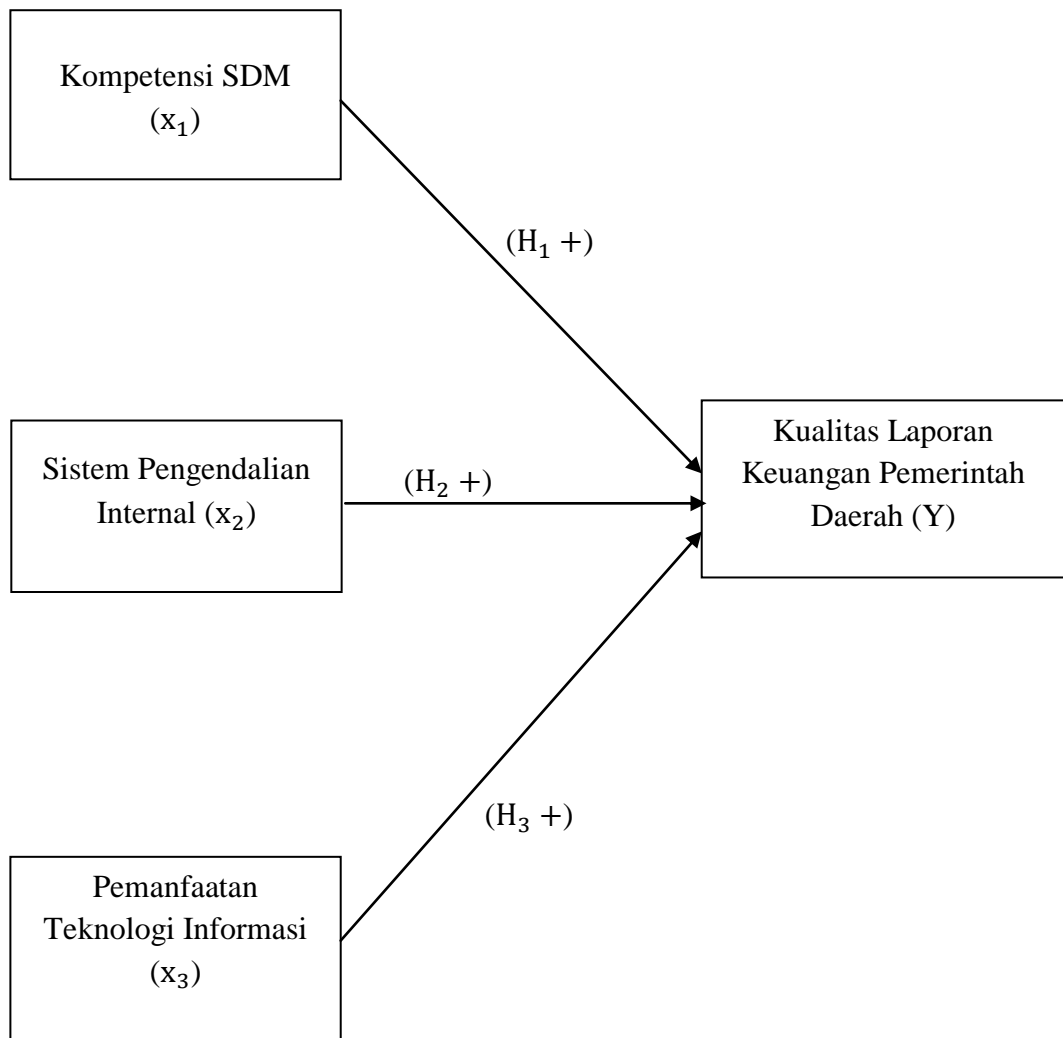
Teknologi informasi merupakan suatu perangkat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam proses mendapatkan informasi, penyimpanan dan selanjutnya memaparkan serta menyampaikan informasi. Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu komputer dan jaringan akan sangat membantu mempermudah, mempercepat proses pengolahan data yang berupa transaksi dan penyajian laporan keuangan Pemerintah dengan ini Laporan Keuangan yang diolah tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuniatin *et al.* (2017), Abdullah *et al.* (2018), dan Sari (2014) hasilnya menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Ketepatanwaktuan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi atau indikator penting dalam Laporan Keuangan agar dapat dikatakan berkualitas, peran dari Pemanfaatan teknologi informasi Pemerintahan yaitu digunakan untuk meningkatkan ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi semakin tinggi penggunaannya, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin baik.

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari tiga variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memengaruhi variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Model penelitian yang akan digunakan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi Kualitas Laporan Pemerintah Daerah yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.



Gambar 2.1 : Model Penelitian

